

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Penulis,



Maulana Fajar Triwibowo

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023

Nama : Maulana Fajar Triwibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 18313264
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Mei 2025

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi MA.Ec., Ph.D.

NIP: 923130101

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2016-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Maulana Fajar Triwibowo

Nomor Induk Mahasiswa : 18313264

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2023

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	: Maulana Fajar Triwibowo
Nomor Mahasiswa	: 18313264
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Penulis,



Maulana Fajar Triwibowo

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023

Nama : Maulana Fajar Triwibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 18313264
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Mei 2025
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. Akhsyim Afandi MA.Ec., Ph.D.
NIP: 923130101

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT' atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat diberi kelancaran dalam menyelesaikan penelitian. Penulis mempersembahkan sebuah karya penelitian ini teruntuk;

1. Kedua orang tua bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segalanya sehingga anakmu bisa mencapai titik ini semoga ilmu yang telah diperoleh dapat berguna bagi keluarga khususnya untuk kedua orang tua tercinta.
2. Kepada Kakak tercinta saya Single Bangkit Bayu Purnama dan Linda Pebrina Wulandari terimakasih atas segala dukungan dan semangat serta doa-doa.
3. Kepada Muhammad Ibnu Faqih Wijaya dan Indra Saputra atas kesabaran dan dukungannya yang terus-menerus. Para sahabat sekolah dan kuliah yang selalu membantu dalam keadaan susah maupun senang.
4. Dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan saran dan membimbing dalam penyelesaian penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Diri penulis sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk selama ini dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT penulis haturkan atas segala berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2023”**. Dengan berbagai keterbatasan yang penulis miliki, penelitian ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya tanpa bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan yang telah diberikan peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala rasa puji dan syukur kepada Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Ibu saya, yang telah mendoakan tanpa henti dan memberikan penulis semangat dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D. MA Ketua Prodi Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Dosen pembimbing, Bapak Drs. Akhsyim Afandi MA.Ec., Ph.D. yang telah membimbing penelitian ini sehingga dapat diselesaikan.
7. Semua dosen Prodi Ilmu Ekonomi yang sudah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Mas Bangkit dan Mbak Wulan selalu mendukung penulis.
9. Kepada Indra dan Faqih yang selalu membantu dan meberikan saran dalam penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2018 dan terkhususnya Indra, Faqih, Nidhom, Arul, Risky, Ghufon, Aufa, Rahmat yang telah membantu, berbagi ilmu dan saling mendukung dan menyemangati dalam kegiatan perkuliahan.

11. Kepada seluruh Staff Akademika dan semua pihak yang telah membantuTerimakasih lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah disebut dan yang belum disebutkan telah memberi dukungan dan doa sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Semoga karya ini dapat memberi dan membawa kebaikan serta manfaat bagi akademisi maupun praktisi.

Yogyakarta, 9 Mei 2025
Penulis



Maulana Fajar Triwibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia	9
2.2.2 Dana Alokasi Umum.....	10
2.2.3 Dana Alokasi Khusus.....	11
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah	11
2.2.5 Jumlah Penduduk.....	12
2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	13
2.2.7 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	13
2.3 Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen	14
2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IPM.....	14
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap IPM.....	14
2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM	15

2.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM.....	16
2.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM.....	16
2.3.6 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM	16
2.4 Kerangka Pemikiran	17
2.5 Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis dan teknik pengumpulan data	20
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	20
3.2.1 Variabel Dependen	20
3.2.2 Variabel Independen	21
3.3 Metode Analisis	23
3.3.1 Model Common Effect.....	23
3.3.2 Model Fixed Effect.....	25
3.3.3 Model Random Effect	25
3.4 Pemilihan Model.....	25
3.4.1 Uji Chow (Chow Test)	26
3.4.2 Uji Hausman (Hausman Test)	26
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	27
3.5 Pengujian Statistik	27
3.5.1 Koefisien Determinasi (R ²).....	27
3.5.2 Uji F-statistic (Uji Kelayakan Model).....	27
3.5.3 Uji t-statistic (Uji Parsial)	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Statistik Deskriptif.....	30
4.2 Pengujian Hipotesis.....	31
4.2.1 Uji Chow	31
4.2.2 Uji lagrange multiplier	32
4.2.3 Uji Hausman.....	32
4.3 Hasil Model Terbaik Fixed Effect Model	33
4.4 Uji Statistik	33
4.4.1 R-Square.....	33

4.4.2 Uji T.....	34
4.4.3 Uji F.....	35
4.5 Pembahasan.....	35
4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	35
4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	36
4.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	37
4.5.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	38
4.5.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	39
4.5.6 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran dan Implikasi	43
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa 2016-2023	3
Tabel 4. 1 Hasil statistik deskriptif.....	30
Tabel 4. 2 Hasil uji Chow.....	31
Tabel 4. 3 Hasil uji lagrange multiplier	32
Tabel 4. 4 Hasil uji Hausman.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perbandingan IPM Jawa Tengah Dan Nasional.....	2
--	---

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, PAD, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023. Metode penelitian yang digunakan metode data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 9. Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect dengan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, PAD, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci: IPM, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, PAD, Pengeluaran Bidang Kesehatan, Pengeluaran Bidang Pendidikan dan Jumlah Penduduk.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

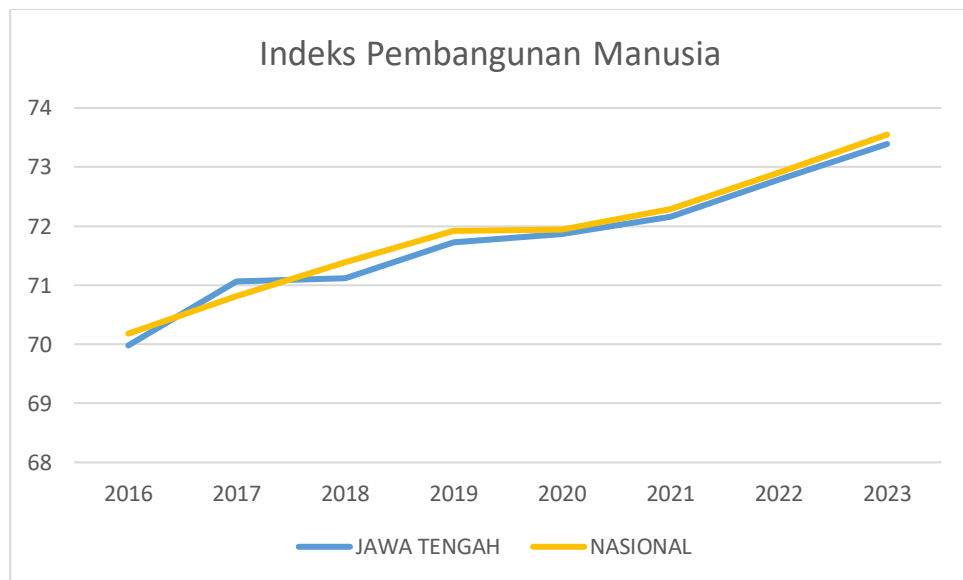
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai 69,98 dan meningkat menjadi 73,39 pada tahun 2023. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPM Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui latar belakang dari peningkatan IPM di Jawa Tengah pada periode 2016-2023.

Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada mutu sumber daya manusianya, yang berperan sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2011), manusia merupakan aset fundamental dalam pembangunan, sementara sumber daya alam dan modal fisik hanya berfungsi sebagai pendukung pasif dalam proses produksi. Dengan kata lain, manusia memiliki peranan dominan dalam mengelola sumber daya yang ada dan mendorong kemajuan nasional.

Ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten menjadi syarat penting bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 sebagai indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Seiring waktu, IPM menjadi

tolok ukur penting dalam mengukur capaian pembangunan suatu wilayah atau negara (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah memainkan peran strategis. Ritonga dalam Mongan (2019) menegaskan bahwa komitmen pemerintah tercermin dari kebijakan pengeluaran yang difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di antara ketiganya, pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang proporsional pada dua sektor tersebut sangat penting untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang merata.



Grafik 1. 1 Perbandingan IPM Jawa Tengah Dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Sejak tahun 2016 hingga 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun belum mampu melampaui rata-rata nasional. Pada tahun 2023, IPM Jawa Tengah mencapai angka 73,39 persen, mendekati IPM nasional yang tercatat sebesar 73,55 persen. Namun demikian, apabila tren

pertumbuhan ini tidak dipertahankan, maka dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang lebih besar antara Jawa Tengah dan capaian IPM nasional (Zulham et al., 2017).

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DKIJAKARTA	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65	82.46
YOGYAKARTA	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64	81.07
BANTEN	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32	73.87
JAWA BARAT	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09	72.14	73.12	73.74
JAWA TENGAH	69.98	71.06	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79	73.39
JAWA TIMUR	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75	73.38

Tabel 1. 1 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa 2016-2023

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Dalam konteks regional, terutama di kawasan Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi yang relatif rendah dalam lima tahun terakhir. Meski mengalami kenaikan angka IPM, posisi Jawa Tengah masih berada di peringkat kelima dari enam provinsi di wilayah ini, hanya lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa laju peningkatan IPM Jawa Tengah masih belum mampu menyaingi sebagian besar provinsi tetangganya.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan IPM tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025, yang mengusung visi “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari.” Salah satu arah kebijakan strategis yang diusung adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan tujuan agar Provinsi Jawa Tengah memiliki daya saing yang kuat baik di tingkat nasional maupun regional.

Namun demikian, realisasi peningkatan kualitas manusia di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan IPM antar wilayah dalam provinsi tersebut. Perbedaan ini berdampak pada belum meratanya akses masyarakat terhadap sumber daya dan kesempatan pengembangan diri yang adil

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2023.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap IPM di provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah ?
6. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah ?
7. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM kabupaten/kotadi provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi jawa Tengah.

4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
6. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
7. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis : Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Bagi Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pembangunan manusia.
3. Bagi Peneliti : Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta memperluas wawasan akademik terkait faktor-faktor yang memengaruhi IPM di tingkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka awal dalam memahami ruang lingkup studi ini.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menyajikan ulasan literatur dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan, serta memaparkan konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Selain itu, dijelaskan pula hipotesis yang menjadi dasar asumsi awal dalam penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV: Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bagian bab ini menjelaskan deskripsi dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan serta penjelasan lebih lanjut dari hasil pengelolaan data.

BAB V : Kesimpulan dan Implikasi

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan memuat saran-saran yang dijelaskan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada berbagai studi sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yaitu analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Studi-studi terdahulu dijadikan sebagai dasar perbandingan dan rujukan dalam merumuskan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Studi yang dilakukan oleh Aryanti (2023) bertajuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015–2021 bertujuan untuk menguji pengaruh indeks pendidikan, indeks kesehatan, jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dengan cakupan 38 kabupaten/kota selama periode tujuh tahun (2015–2021). Berdasarkan hasil estimasi model random effect, ditemukan bahwa indeks pendidikan, kesehatan, dan angkatan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan.

Sementara itu, Rahmadillah & Nurfaiza (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur menggunakan pendekatan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU dan DAK memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan IPM.

Kusumaningrum (2016) melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2006–2016. Penelitian ini menggunakan data panel dan menguji pengaruh jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap IPM. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan serta jumlah penduduk miskin memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM.

Penelitian oleh Meydiasari & Soejoto (2017) menganalisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM nasional pada periode 2010–2015. Dengan menggunakan model regresi data panel, ditemukan bahwa distribusi pendapatan dan pengeluaran di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap IPM.

Dalam studi lain, Soleha & Fathurrahman (2017) meneliti pengaruh belanja pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan, serta investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN), terhadap IPM Indonesia dalam rentang waktu 1985–2014. Dengan menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM), diperoleh hasil bahwa belanja kesehatan dan PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, pengeluaran pendidikan dan PMA justru memberikan pengaruh signifikan namun negatif terhadap IPM.

Penelitian oleh Wijiani (2018) menganalisis determinan IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010–2016. Variabel yang dikaji meliputi PDRB, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan, serta tingkat pengangguran terbuka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PDRB, penduduk miskin, dan pengeluaran kesehatan memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM, sementara pengeluaran pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan tinjauan terhadap literatur di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal wilayah cakupan, periode waktu, serta variabel yang dianalisis. Penelitian ini fokus pada IPM sebagai variabel dependen di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016–2023. Variabel independen yang digunakan meliputi jumlah penduduk, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemilihan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Provinsi Jawa Tengah secara empiris.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan elemen sentral dalam menilai kemajuan suatu wilayah, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Kemajuan suatu daerah tidak cukup diukur hanya melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melainkan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih mendasar, seperti kualitas pendidikan dan kesehatan. Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa manusia merupakan inti dari pembangunan itu sendiri. Sumber daya alam (SDA) dan modal fisik hanya berperan sebagai pendukung pasif, sementara sumber daya manusia (SDM) berperan aktif dalam mengelola potensi alam, menghimpun modal, dan mendorong pembangunan secara keseluruhan, baik dalam lingkup lokal maupun nasional.

United Nations Development Programme (UNDP, 1990) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses yang bertujuan memperluas pilihan-pilihan individu. Pembangunan ini tidak hanya menjadi arah perbaikan, tetapi juga ukuran dari keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Inti dari pembangunan manusia terletak pada peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Dalam kerangka tersebut, terdapat empat prinsip penting yang perlu diperhatikan, yakni pemerataan, keberlanjutan, pertumbuhan yang adil, dan pemberdayaan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hadir sebagai alat ukur yang komprehensif untuk menilai pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Di Indonesia, IPM juga menjadi salah satu dasar penting dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2022).

Menurut Badan Pusat Suutastistik (2015), IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama yang mencerminkan kualitas hidup manusia, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui angka harapan hidup, (2) akses terhadap pendidikan yang tercermin dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta (3) standar hidup layak yang diukur melalui daya beli masyarakat, dengan pendekatan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita.

Dalam praktiknya, tingkat capaian IPM di suatu wilayah dikategorikan ke dalam empat kelompok untuk mempermudah analisis dan perbandingan antarwilayah. Klasifikasi tersebut mencakup:

- IPM di bawah 60 dikategorikan sebagai rendah,
- IPM antara 60–70 termasuk kategori sedang,
- IPM antara 70–80 berada dalam kelompok tinggi,
- IPM di atas 80 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Pengelompokan ini membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas kebijakan dan intervensi pembangunan secara lebih terarah sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bersifat umum dan tidak terkait dengan penggunaan tertentu. Artinya, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing. Tujuan utama dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, yang mana daerah-daerah yang memiliki potensi pendapatan lebih rendah mendapatkan alokasi yang lebih besar, sehingga menciptakan kesetaraan dalam hal pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

DAU dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan dua komponen utama: kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal mencerminkan kebutuhan dana untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan memberikan layanan publik yang memadai. Sementara itu, kapasitas fiskal mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah akan menerima alokasi DAU yang lebih besar untuk menutupi kekurangan dalam anggaran mereka. DAU juga berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri guna memperkuat otonomi daerah (Kementerian Keuangan, 2022).

2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang penggunaannya bersifat fleksibel, DAK memiliki peruntukan yang spesifik, misalnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

DAK terdiri dari dua jenis utama: DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik dialokasikan untuk mendukung pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, DAK Non-Fisik lebih diarahkan pada pengembangan kualitas layanan publik, misalnya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan DAK harus sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diatur dalam peraturan pemerintah. Daerah penerima DAK biasanya adalah daerah yang memiliki kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dan memerlukan bantuan tambahan untuk mendukung pembangunan (Kementerian Keuangan, 2022).

DAK juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Dengan adanya DAK, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa daerah-daerah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik tetap mendapat dukungan yang memadai untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah mereka, serta dari aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. PAD mencakup beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan berbagai jenis pajak lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan

atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir, retribusi sampah, dan retribusi pasar. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh pemerintah daerah.

PAD sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di daerah, karena semakin besar PAD yang dapat dikumpulkan, semakin besar pula kapasitas daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat. Daerah yang memiliki PAD yang kuat juga cenderung memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, sehingga dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat (UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Namun, potensi PAD di setiap daerah sangat bervariasi, tergantung pada kekayaan sumber daya alam, basis ekonomi, serta infrastruktur yang tersedia di daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti daerah perkotaan atau daerah yang kaya akan sumber daya alam, cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih tertinggal.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah ukuran yang menunjukkan total populasi yang tinggal di suatu wilayah atau daerah pada waktu tertentu. Data jumlah penduduk ini sangat penting dalam konteks perencanaan pembangunan, karena kebutuhan akan layanan publik, infrastruktur, serta fasilitas sosial sangat bergantung pada jumlah dan distribusi penduduk di suatu daerah.

Jumlah penduduk tidak hanya memengaruhi alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Selain itu, jumlah penduduk juga berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena lebih banyak penduduk berarti lebih besar pula potensi pasar dan tenaga kerja yang tersedia untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk terus bertambah seiring dengan tingkat kelahiran dan migrasi. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang memadai, agar pertumbuhan penduduk tidak berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat memberikan peluang ekonomi jika dapat dimanfaatkan dengan baik, misalnya melalui pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja baru (BPS, 2022).

2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu bidang utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peran kesehatan sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran guna mendukung pembiayaan berbagai fasilitas kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pengeluaran untuk sektor kesehatan harus dialokasikan secara proporsional dan memadai. Dalam hal ini, pemerintah pusat diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah setempat perlu mengalokasikan paling sedikit 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber daya manusia yang sehat memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih produktif dalam dunia kerja, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pendapatan individu (Todaro & Smith, 2011).

2.2.7 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor esensial yang memperoleh perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara. Pendidikan dianggap sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, karena mampu mendorong kemajuan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai bentuk investasi strategis, dampak positif pendidikan tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga dalam jangka waktu yang lebih luas melalui terciptanya masyarakat yang adaptif dan kompetitif. Berdasarkan ketentuan

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat, pemerintah diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN maupun APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan. Kebijakan ini ditujukan guna menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

2.3 Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen

2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IPM

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. DAK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan IPM.

DAK diarahkan untuk membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Investasi pada sektor-sektor ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses dan mutu layanan dasar. Sebagai contoh, DAK bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, pengadaan peralatan belajar, serta peningkatan kompetensi guru. Sementara itu, DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan alat kesehatan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Penelitian oleh Nashshar & Mulyana (2022) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui belanja modal pemerintah daerah sebagai variabel mediasi. Belanja modal yang didanai oleh DAK meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik, yang pada gilirannya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendorong peningkatan IPM.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap IPM

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen utama dalam sistem transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan utama dari DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan menjamin tersedianya dana bagi daerah untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat.

DAU memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, termasuk sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Penelitian oleh Silalahi (2023) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui belanja modal sebagai variabel intervening. Belanja modal yang didanai oleh DAU digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pengelolaan DAU yang efektif dapat mempercepat pencapaian target pembangunan manusia di daerah.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Penelitian oleh Subagia & Utama (2022) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini disebabkan oleh kemampuan daerah dalam mengelola PAD untuk membiayai belanja modal yang mendukung pembangunan manusia. Belanja modal yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan salah satu instrumen fiskal yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi di sektor pendidikan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM.

Penelitian oleh Harjunadhi & Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang mendorong peningkatan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dua komponen utama dalam pengukuran IPM.

2.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan merupakan investasi strategis dalam pembangunan manusia. Alokasi anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan angka harapan hidup, salah satu komponen utama dalam pengukuran IPM.

Penelitian oleh Damayanti & Suryaningrum (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Studi ini menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.3.6 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM

Jumlah penduduk merupakan faktor demografis yang dapat memengaruhi pembangunan manusia di suatu daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dapat memberikan tantangan dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan komponen utama dalam pengukuran IPM. Namun, dalam konteks tertentu, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik dan pengelolaan yang efektif. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.

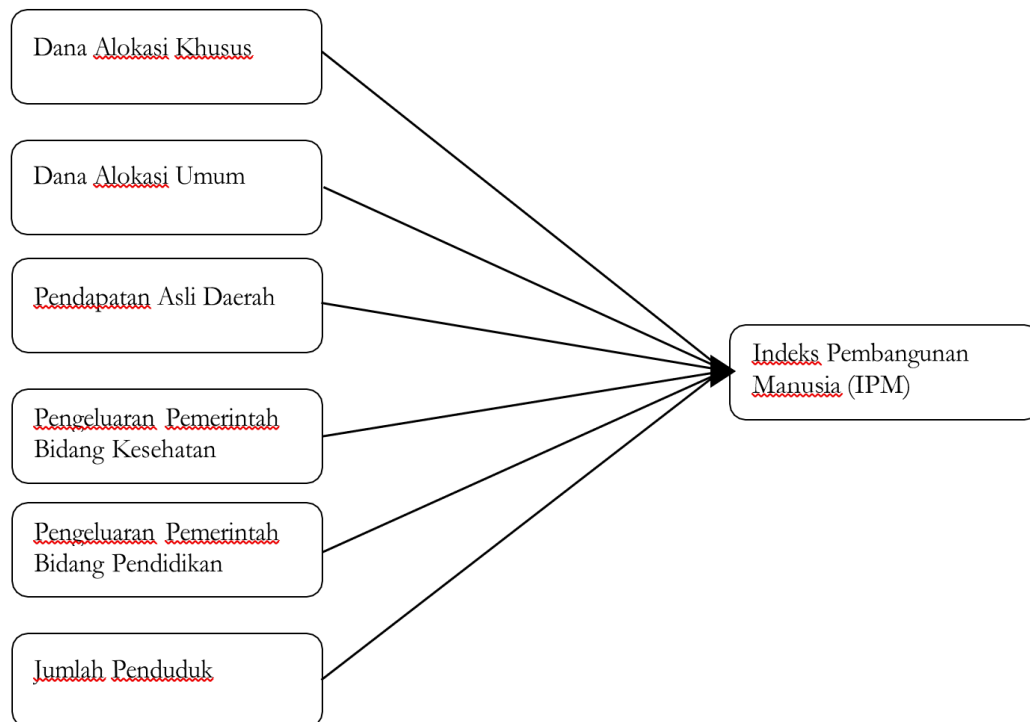
Penelitian oleh Adim (2021) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini disebabkan oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai modal pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016–2023. Dalam studi ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen dan variabel independen. IPM bertindak sebagai variabel dependen yang menjadi fokus utama analisis. Adapun variabel independen terdiri dari beberapa faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap IPM, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pemerintah di sektor kesehatan, belanja pemerintah di sektor pendidikan, serta jumlah penduduk.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana kontribusi masing-masing faktor terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah yang diteliti. Secara konseptual, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara belanja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam capaian IPM. Berikut ini gambaran kerangka pemikiran yang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yang akan diuji validitasnya secara empiris melalui metode analisis kuantitatif. Asumsi tersebut dirumuskan berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dengan mengacu pada kajian pustaka dan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
Artinya, semakin besar DAK yang diterima oleh suatu daerah, maka semakin meningkat pula capaian IPM di daerah tersebut.
2. **Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM**
Artinya, peningkatan DAU di suatu daerah akan berkontribusi pada perbaikan

kualitas pembangunan manusia.

3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM**

Artinya, semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM**

Artinya, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, maka akan semakin mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM.

5. **Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM**

Artinya, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, maka akan semakin meningkatkan IPM di daerah tersebut.

6. **Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM**

Artinya, peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan kebijakan pembangunan yang tepat dapat mendorong peningkatan IPM melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hidup penduduk.

Dengan demikian, keseluruhan hipotesis penelitian ini adalah bahwa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, serta jumlah penduduk, semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016–2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai instansi resmi dan kredibel. Sumber utama data mencakup Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta dinas-dinas terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yakni kombinasi antara data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data *time series* meliputi periode tahun 2016 hingga 2023. Variabel yang dianalisis meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan selama kurun waktu tersebut.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mengkaji dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. IPM sebagai variabel dependen mewakili kualitas pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota, sedangkan variabel independen terdiri dari beberapa indikator fiskal dan belanja pemerintah yang diasumsikan memengaruhi IPM. Rincian definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. IPM mencerminkan capaian dalam tiga dimensi utama: kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (melalui daya beli masyarakat). Data IPM dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dan mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016–2022. Satuan yang digunakan adalah dalam bentuk persentase (%).

3.2.2 Variabel Independen

1. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai proyek-proyek khusus atau prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau pelayanan dasar tertentu seperti kesehatan dan pendidikan. DAK memiliki sifat yang terikat pada penggunaan tertentu sesuai dengan kebijakan pusat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2016 hingga 2023. Seluruh data keuangan disajikan dalam satuan juta rupiah.

2. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah guna membantu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU diberikan secara merata dan dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan umum di daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2016 hingga 2023. Seluruh data keuangan disajikan dalam satuan juta rupiah.

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut dan menjadi salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Tingginya PAD menunjukkan tingginya kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonominya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 35 kabupaten/kota di wilayah

Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2016 hingga 2023. Seluruh data keuangan disajikan dalam satuan juta rupiah.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP)

Pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan meliputi alokasi anggaran yang diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai kegiatan di sektor pendidikan, seperti gaji guru, biaya operasional sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta berbagai program pendidikan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2016 hingga 2023. Seluruh data keuangan disajikan dalam satuan juta rupiah.

5. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK)

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan merujuk pada alokasi anggaran pemerintah untuk layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mencakup 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk periode tahun 2016 hingga 2023. Seluruh data keuangan disajikan dalam satuan juta rupiah.

6. Variabel Jumlah Penduduk (JP)

Jumlah penduduk adalah total populasi yang tinggal di suatu wilayah atau daerah tertentu. Data jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Jumlah penduduk memengaruhi berbagai aspek kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2023 dengan satuan jiwa.

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel, yang diolah menggunakan perangkat lunak *EViews* versi 9. Metode data panel memungkinkan analisis terhadap data yang merupakan gabungan antara data *time series* (data berdasarkan urutan waktu) dan *cross-section* (data berdasarkan unit pengamatan pada waktu tertentu). Menurut Widarjono (2018), data time series mencerminkan kumpulan informasi yang disusun secara kronologis, seperti harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Sebaliknya, data *cross-section* dihimpun dari berbagai unit atau objek pada satu titik waktu tertentu. Ketika keduanya digabungkan, terbentuklah struktur data panel yang memiliki cakupan waktu dan variasi unit pengamatan.

Kelebihan penggunaan data panel dibandingkan hanya menggunakan salah satu jenis data terletak pada kemampuan untuk menghasilkan jumlah observasi yang lebih besar, sehingga memberikan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih tinggi dalam model estimasi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengurangi masalah bias yang mungkin timbul akibat penghilangan variabel penting, serta meningkatkan efisiensi estimasi model (Widarjono, 2018).

Dalam implementasinya, regresi data panel terdiri atas tiga model dasar, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Ketiga model tersebut diestimasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengujian lanjutan untuk menentukan model yang paling sesuai dan optimal untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.3.1 Model Common Effect (*Common Effect Model*)

Model *common effect* merupakan bentuk paling sederhana dari model regresi data panel. Dalam pendekatan ini, data dari dimensi waktu (*time series*) dan unit pengamatan (*cross-section*) digabungkan menjadi satu set data panel, kemudian dianalisis menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Menurut Widarjono (2018), model ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan khusus antar unit pengamatan atau waktu, sehingga perlakuan terhadap seluruh entitas dalam model bersifat seragam.

Model *common effect* tidak mempertimbangkan adanya efek heterogenitas antar individu atau entitas, sehingga cocok digunakan ketika diasumsikan bahwa struktur data relatif homogen. Persamaan umum dari model ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam bentuk matematis. Persamaan model sebagai berikut:

$$\ln IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln DAK_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln PAD_{it} + \beta_4 \ln PPBP_{it} + \beta_5 \ln PPBK_{it} + \beta_6 \ln JP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
JP	= Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)
DAU	= Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah)
DAK	= Dana Alokasi Khusus (Juta Rupiah)
PPBP	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (Juta Rupiah)
PPBK	= Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (Juta Rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
ε	= Variabel Di Luar Model
I	= entitas ke-i
T	= periode ke-t

3.3.2 Model Fixed Effect (*Fixed Effect Model*)

Model efek tetap (*fixed effect*) merupakan pendekatan dalam analisis regresi panel yang menggunakan teknik estimasi dengan variabel dummy. Pendekatan ini mengasumsikan adanya perbedaan nilai intersep antar individu, namun tetap konsisten terhadap waktu. Artinya, setiap entitas memiliki karakteristik khusus yang tidak berubah sepanjang waktu, sehingga intersepanya berbeda, tetapi koefisien regresinya diasumsikan tetap baik antar waktu maupun individu. Dengan kata lain, model ini memperhitungkan efek individual yang mungkin memengaruhi hasil analisis namun tidak terukur secara langsung. Berikut merupakan bentuk umum dari model *fixed effect*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 PPBP_{it} + \beta_5 PPBK_{it} + \beta_6 JP_{it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{34} D_{34} + e_{it}$$

3.3.3 Model Random Effect (*Random Effect Model*)

Model *random effect* digunakan dalam analisis data panel ketika variasi antar individu dianggap sebagai bagian dari *error* atau gangguan yang memiliki distribusi tertentu. Model ini menggabungkan unsur data *cross-section* dan time series secara menyeluruh dengan memperhitungkan gangguan yang mungkin berbeda antara individu maupun periode waktu. Dalam pendekatan ini, diasumsikan bahwa perbedaan individu tidak terikat pada waktu tertentu dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Oleh karena itu, model efek acak cocok digunakan saat efek individual dianggap acak dan tidak saling tergantung. Bentuk umum dari model ini disajikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \beta_4 PPBP_{it} + \beta_5 PPBK_{it} + \beta_6 PPBP_{it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{34} D_{34} + \varepsilon_{it}$$

3.4 Pemilihan Model

Dalam penerapan regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pemilihan model terbaik sangat penting agar hasil estimasi dapat merepresentasikan hubungan antara variabel

dependen dan independen secara akurat. Terdapat dua tahapan utama dalam menentukan model regresi panel yang paling sesuai. Tahap pertama adalah membandingkan model *fixed effect* dengan *common effect* menggunakan uji Chow. Jika hasilnya menunjukkan bahwa *fixed effect* lebih unggul, maka dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu membandingkan *fixed effect* dengan *random effect* melalui uji Hausman. Pengujian-pengujian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 9*.

3.4.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow dilakukan untuk mengevaluasi apakah model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *common effect*. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa model *fixed effect* memberikan hasil estimasi yang lebih baik, maka analisis dilanjutkan dengan uji Hausman. Sebaliknya, jika model *common effect* dianggap lebih sesuai, maka pengujian berhenti pada tahap ini. Hipotesis yang digunakan dalam uji Chow adalah:

H₀ : model *common effect* lebih baik daripada model *fixed effect*

H₁ : model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*

Keputusan ditentukan dengan membandingkan nilai F-statistik dan nilai F-kritis. Jika F-statistik lebih besar dari F-kritis, maka H₀ ditolak dan model *fixed effect* dipilih. Jika sebaliknya, maka model *common effect* menjadi pilihan.

3.4.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman bertujuan membandingkan model *fixed effect* dengan model *random effect*. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀ : model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*

H₁ : model *fixed effect* lebih baik daripada model *random effect*

Uji ini menggunakan nilai statistik *chi-square*. Bila nilai *chi-square* statistik melebihi nilai kritisnya, maka H₀ ditolak dan model *fixed effect* lebih layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai statistik lebih kecil, maka model *random effect* dianggap lebih tepat.

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier*)

Uji LM digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih sesuai dibandingkan *common effect*. Pengujian ini dilakukan dengan metode *Ordinary Least Squares* dan menggunakan pendekatan *Breusch-Pagan*. Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : model *common effect* lebih baik daripada model *random effect*

H_1 : model *random effect* lebih baik daripada model *common effect*

Apabila hasil uji menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka H_0 ditolak dan model *random effect* dipilih. Jika lebih besar, maka model *common effect* dianggap paling sesuai untuk digunakan.

3.5 Pengujian Statistik

Pengujian statistik dilakukan sebagai langkah penting dalam memperoleh hasil analisis regresi yang valid. Pengujian ini meliputi koefisien determinasi (R^2), uji F-statistik untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan, serta uji t-statistik guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individual. Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai R^2 mendekati angka 1 maka semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antara kedua jenis variabel tersebut. Sebaliknya, jika nilainya mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tergolong rendah.

3.5.2 Uji F-*statistic* (Uji Kelayakan Model)

Uji F berfungsi untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Proses pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-kritis yang diperoleh dari tabel distribusi F berdasarkan tingkat signifikansi (α) dan derajat kebebasan (df). Hipotesis dalam uji ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, Tidak terdapat pengaruh bersama dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, Terdapat pengaruh bersama yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila F-hitung lebih besar dari F-kritis, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel bebas secara kolektif berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-kritis, maka H_0 tidak ditolak. Selain itu, probabilitas (*p-value*) juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika nilai probabilitas F-statistik berada di bawah tingkat signifikansi (1%, 5%, atau 10%), maka model dianggap layak.

3.5.3 Uji *t-statistic* (Uji Parsial)

Uji *t* digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Nilai *t*-hitung kemudian dibandingkan dengan nilai *t*-kritis berdasarkan distribusi *t* dan derajat kebebasan ($df = n - k$). Hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dana Alokasi Khusus terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap IPM.

$H_1 : \beta_1 < 0$, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap IPM,

b. Variabel Dana Alokasi Umum terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari Dana Alokasi Umum terhadap IPM

$H_1 : \beta_1 < 0$, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap IPM.

c. Variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari PAD terhadap IPM.

$H_1 : \beta_1 < 0$, PAD berpengaruh negatif terhadap IPM.

d. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari belanja pendidikan terhadap IPM.

$H_1 : \beta_1 < 0$, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM.

e. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari belanja kesehatan terhadap IPM.

$H_1 : \beta_1 < 0$, Belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM.

f. Variabel Jumlah Penduduk terhadap IPM

$H_0 : \beta_1 = 0$, Tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk terhadap IPM.

$H_1 : \beta_1 < 0$, Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap IPM.

Jika nilai t-hitung melebihi t-kritis, maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila t-hitung lebih kecil dari t-kritis, maka H_0 tidak dapat ditolak. Keputusan juga dapat diambil berdasarkan nilai probabilitas (*p-value*): jika *p-value* berada di bawah tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%, maka pengaruh dianggap signifikan; jika di atas, maka pengaruh dianggap tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Informasi data statistik dari variabel-variabel yang digunakan disajikan dalam statistik deskriptif. Data yang disajikan mencakup jumlah observasi, nilai maksimum, mean, standar deviasi, serta nilai minimum. Berikut hasil statistik deskriptif.

Variabel	Observasi	Mean	Std. Dev	Min	Max
IPM	280	72.35	4.51	63.98	84.60
DAK	280	312566.8	135912.6	52510	1022710
DAU	280	1080078	323295.3	440041.2	2599482
PAD	280	387344.5	346530	146652	2863408
PPBP	280	726966.9	242171	64331.39	1375154
PPBK	280	404180	135676.9	379.30	1028212
JP	280	1023212	444483.1	121112	2043077

Tabel 4. 1 Hasil statistik deskriptif

Berdasarkan tabel 4.1 statistik deskriptif, terdapat tujuh variabel yang dianalisis dengan jumlah observasi sebanyak 280 untuk masing-masing variabel. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) memiliki rata-rata sebesar 72,35% dengan standar deviasi 4,51%, menunjukkan adanya variasi yang relatif rendah dalam distribusi nilai IPM, dengan nilai minimum 63,98% dan maksimum 84,60%. DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki nilai rata-rata 312566,8 juta dengan standar deviasi 135912,6 juta, yang mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi dana dengan nilai minimum 52510 juta dan maksimum 1022710 juta. DAU (Dana Alokasi Umum) menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 1080078 juta dengan standar deviasi sebesar 323295,3 juta, menunjukkan adanya variasi besar dalam alokasi dana dengan rentang nilai antara 440041,2 juta hingga 2599482 juta.

Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki rata-rata 387344,5 juta dengan standar deviasi 346530 juta, mencerminkan distribusi yang luas dengan nilai minimum 146652 juta dan maksimum 2864308 juta. PPBP (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan) memiliki rata-rata sebesar 726966,9 juta dan standar deviasi 242171 juta, menunjukkan variasi sedang dengan nilai minimum 64331,39 juta dan maksimum 1375154 juta. PPBK (Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan) memiliki rata-rata 404180 juta dengan standar deviasi 135676,9 juta, mencerminkan fluktuasi yang cukup besar dengan nilai minimum yang sangat rendah, yaitu 379,3 juta, hingga nilai maksimum 1028212 juta. Terakhir, JP (Jumlah Penduduk) memiliki rata-rata 1023212 juta dengan standar deviasi 444483,1 juta, menunjukkan variasi populasi yang cukup besar dengan rentang nilai antara 121112 juta hingga 2043077 juta. Variasi dalam masing-masing variabel ini mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan sosial yang cukup signifikan di antara wilayah-wilayah yang dianalisis.

4.2 Pengujian Hipotesis

Hasil uji pemilihan model terbaik pada penelitian ini diantaranya:

4.2.1 Uji Chow

Hasil uji Chow ditampilkan di Tabel 4.2 disertai hipotesisnya sebagai berikut.

Ho: model terbaik CEM.

Ha: model terbaik FEM

Uji	F-stats	Prob.
Uji Chow	209.218534	0.0000

Tabel 4. 2 Hasil uji Chow

Lampiran 3; sumber: olah data dengan Stata 17

Hasil uji Chow di Tabel 4.2 memperlihatkan probabilitas *cross-section* F bernilai 0,0000 yang kurang daripada alfa 5% ($0,0000 < 0,05$). Maka dari itu, hipotesis nol ditolak atau FEM lebih baik daripada CEM.

4.2.2 Uji lagrange multiplier

Hasil dari pengujian menggunakan metode *Lagrange Multiplier* (LM) ditampilkan pada Tabel 4.3. Pengujian inbertujuan untuk menentukan model yang paling tepat antara *common effect* dan *random effect* dalam analisis regresi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut: i

H 0 = Model *common effect* merupakan model yang paling sesuai

H a = Model *random effect* merupakan model yang paling sesuai

Uji	F-stats	Prob.
Uji lagrange multiplier	739.84	0,0000

Tabel 4. 3 Hasil uji lagrange multiplier

Lampiran 5; sumber: olah data dengan Stata 17

Berdasarkan output pengujian yang tercantum dalam Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai probabilitas dari uji *Breusch-Pagan* adalah sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti bahwa model *random effect* dipilih sebagai model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Uji Hausman

Hasil uji Hausman disajikan pada Tabel 4.4 dengan hipotesis

Ho: model terbaik REM.

Ha: model terbaik FEM.

Uji	F-stats	Prob.
Uji Hausman	132.554741	0.0000

Tabel 4. 4 Hasil uji Hausman

Lampiran 4; sumber: olah data dengan Stata 17

Hasil uji Hausman di Tabel 4.4 memperlihatkan probabilitasnya bernilai 0,0000 yang kurang daripada alfa 5% ($0,0000 < 0,05$). Artinya adalah gagal menolak hipotesis nol atau model terbaik dalam uji Hausman ialah FEM.

4.3 Hasil Model Terbaik Fixed Effect Model

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/25 Time: 23:04

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-143.1474	12.46041	-11.48818	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.212721	0.080729	2.635007	0.0090
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.124759	0.243901	4.611539	0.0000
LOG(PAD)	2.612356	0.239250	10.91894	0.0000
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH B...	-0.367719	0.211640	-1.737478	0.0836
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH D...	0.117577	0.070388	1.670419	0.0961
LOG(JUMLAH PENDUDUK)	8.494009	1.125642	7.545922	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989160	Mean dependent var	72.35329
Adjusted R-squared	0.987346	S.D. dependent var	4.519494
S.E. of regression	0.508407	Akaike info criterion	1.619462
Sum squared resid	61.77613	Schwarz criterion	2.151699
Log likelihood	-185.7246	Hannan-Quinn criter.	1.832943
F-statistic	545.2146	Durbin-Watson stat	1.243015
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.4 Uji Statistik

4.4.1 R-Square

Nilai R-squared (R^2) sebesar 0.989160 menunjukkan bahwa sekitar 98.91% variasi dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini, yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah kategori B dan D, serta Jumlah Penduduk. Sementara itu, sisanya 1.09% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.987346 mengindikasikan bahwa setelah menyesuaikan jumlah variabel independen dalam model, tingkat keakuratan model tetap tinggi,

menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan variabilitas Indeks Pembangunan Manusia.

4.4.2 Uji T

1. Variabel DAK memiliki koefisien 0.212721, dan probabilitas sebesar ($0.0000 < 0.05$) maka variabel DAK memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Apabila DAK meningkat 1%, maka IPM meningkat sebesar 0.212721%.
2. Variabel DAU memiliki koefisien 1.124759 dan probabilitas sebesar ($0.0090 < 0.05$), maka variabel ini signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Apabila DAU meningkat 1%, maka IPM meningkat sebesar 1.124759%.
3. Variabel PAD memiliki koefisien 2.612356 dan probabilitas sebesar ($0.0000 < 0.05$), maka variabel ini signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 1%, maka IPM meningkat sebesar 2.612356%.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hasil koefisien yang negatif atau -0.367719 dan probabilitas sebesar ($0.0836 < 0.10$), maka variabel ini signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Apabila Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan meningkat 1%, maka IPM justru turun sebesar 0.367719%.
5. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki koefisien 0.117577 dan probabilitas sebesar ($0.0961 < 0.10$), maka variabel ini signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Apabila Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan meningkat 1%, maka IPM meningkat sebesar 0.117577%.
6. Variabel Jumlah Penduduk memiliki koefisien 8.494009 dan probabilitas sebesar ($0.0000 < 0.05$), maka variabel ini signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Apabila jumlah penduduk meningkat 1%, maka IPM akan turun sebesar 8.494009%. Jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi dan sosial dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia.

4.4.3 Uji F

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 545.2146 dengan probabilitas (Prob. *F-statistic*) sebesar 0.000000. Ini berarti bahwa secara simultan, variabel independen dalam model, yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah kategori B dan D, serta Jumlah Penduduk, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hipotesis nol yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi bernilai nol dapat ditolak, sehingga model ini secara keseluruhan dianggap valid dalam menjelaskan variasi Indeks Pembangunan Manusia.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen fiskal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai program-program prioritas nasional, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DAK yang signifikan berkontribusi secara positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dana ini digunakan untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Misalnya, dalam sektor pendidikan, DAK dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Di sektor kesehatan, alokasi DAK yang tepat dapat meningkatkan fasilitas layanan kesehatan, penyediaan tenaga medis, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Dalam aspek infrastruktur, DAK berperan dalam membangun sarana transportasi dan fasilitas publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, semakin besar dan efektif pengelolaan DAK, semakin tinggi pula dampak positifnya terhadap peningkatan IPM, karena masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap layanan dasar yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadillah & Nurfaiza, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini juga didukung oleh temuan (Utami & Gunawan, 2023) yang menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus berkontribusi positif dalam meningkatkan IPM di wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, Retribusi Daerah dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, sejalan dengan hasil penelitian Williantara (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah cenderung tidak berdampak terhadap IPM, karena alokasinya lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara efektif mampu mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah diharapkan terus mengoptimalkan penggunaan dana transfer ini untuk pembangunan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah. Sebagai bagian dari transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, DAU bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Signifikansi DAU terhadap IPM tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat—tiga komponen utama yang membentuk IPM. Dengan alokasi dana yang optimal, pemerintah daerah dapat memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta medis, serta mendorong program-program sosial yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dampak positif DAU terhadap IPM juga terlihat dari bagaimana daerah dengan alokasi DAU yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan daya beli masyarakat yang lebih kuat. Oleh karena itu, kebijakan distribusi DAU yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan manusia dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan (Utami & Gunawan, 2023), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berperan signifikan dalam meningkatkan IPM. Sebaliknya, retribusi daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian alokasi pendapatan asli daerah yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada untuk pembangunan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang tepat sasaran akan berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dukungan kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik sangat diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

4.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor kunci yang berperan signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PAD yang tinggi mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Semua faktor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM, karena kualitas hidup, harapan hidup, serta tingkat pendidikan masyarakat semakin membaik. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara PAD dan IPM, di mana peningkatan PAD secara signifikan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhabibah et al., 2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan (Syahputra, 2019) yang menunjukkan bahwa

Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh signifikan dalam meningkatkan IPM. Selain itu, penelitian Muliza et al. (2017) juga membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Angkatan Kerja, dan PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya maksimalisasi realisasi PAD, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PDRB diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

4.5.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sering dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi dalam beberapa kasus, dapat ditemukan hubungan negatif yang signifikan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti efektivitas belanja pendidikan, korupsi, atau alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Jika anggaran pendidikan tidak dikelola dengan baik, peningkatan belanja tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, atau pencapaian akademik yang lebih baik. Selain itu, dalam beberapa negara berkembang, peningkatan belanja pendidikan dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga berkontribusi pada IPM, seperti kesehatan dan ekonomi, sehingga efek keseluruhannya bisa negatif. Efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah peningkatan pengeluaran benar-benar berdampak positif terhadap IPM atau justru menciptakan distorsi dalam pembangunan manusia.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijiani (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan masih belum mampu mendorong pertumbuhan IPM secara optimal. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Winarti (dalam Mongan, 2019), yang mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan memberikan dampak negatif terhadap IPM. Hal ini disebabkan oleh alokasi dana pendidikan yang tidak sepenuhnya

difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, melainkan juga mencakup pembayaran gaji serta berbagai biaya pendidikan lainnya.

4.5.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Investasi yang memadai dalam sektor kesehatan berdampak langsung pada peningkatan harapan hidup, kualitas hidup, serta produktivitas masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang optimal, pemerintah dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur medis, serta memperkuat program kesehatan preventif dan kuratif. Ketika masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik, angka kesakitan dan kematian menurun, memungkinkan individu untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan. Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan IPM, karena indikator kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan indeks tersebut. Dengan demikian, peningkatan belanja pemerintah di sektor kesehatan tidak hanya menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleha & Fathurrahman (2017) yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak dapat mencapai produktivitas optimal. Jaminan kesehatan bagi masyarakat berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Deviyanti Patta, yang menyoroti bahwa pembangunan fasilitas publik serta peningkatan kualitas layanan kesehatan berkontribusi terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan akan berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

4.5.6 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Jumlah Penduduk memiliki signifikansi dan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena populasi yang besar dapat menjadi sumber daya utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan

jumlah penduduk yang tinggi, terutama jika didominasi oleh angkatan kerja produktif, maka peluang pertumbuhan ekonomi meningkat melalui kontribusi tenaga kerja yang lebih besar serta konsumsi domestik yang tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika pertumbuhan penduduk diiringi dengan investasi yang memadai dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka kualitas hidup masyarakat pun akan meningkat, yang tercermin dalam kenaikan IPM. Namun, agar dampak positif ini optimal, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Tanpa strategi pembangunan yang tepat, pertumbuhan penduduk yang tinggi justru dapat menjadi beban, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset berharga yang mendorong peningkatan IPM jika dikelola dengan baik melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2018) jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2016. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui IPM, yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pertumbuhan populasi dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi yang secara tidak langsung mendukung pembangunan manusia. Namun, dampak positif ini harus disertai dengan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia agar pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban bagi pembangunan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Jasasila (2020) bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan IPM karena adanya perluasan pasar tenaga kerja dan peningkatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kemiskinan tetap menjadi faktor penghambat utama dalam pembangunan manusia karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama IPM. Hasil regresi menunjukkan bahwa belanja

modal pemerintah berperan penting dalam meningkatkan IPM melalui investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi dan distribusi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan pertumbuhan penduduk, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan manfaat ekonomi untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. (Nurcholis, 2014)

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Artinya, peningkatan alokasi DAU di suatu daerah berkontribusi pada perbaikan kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Semakin besar nilai DAK yang diterima oleh suatu daerah, semakin besar pula kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan dasar.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti signifikan dan memberikan dampak positif terhadap IPM. Kenaikan PAD mengindikasikan kemampuan fiskal daerah yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan manusia.
5. Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pendidikan belum dioptimalkan secara efektif, atau belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap IPM. Semakin besar belanja sektor kesehatan, semakin tinggi pula kualitas layanan kesehatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7. Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap IPM. Peningkatan jumlah penduduk kemungkinan mencerminkan pertumbuhan wilayah yang diikuti dengan perbaikan akses

terhadap layanan publik, sehingga turut mendorong peningkatan IPM.

5.2 Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang terkumpul, terdapat beberapa Saran dan Implikasi diantaranya:

1. Variabel DAU signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor strategis yang secara langsung berdampak pada peningkatan IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- **Implikasi:** Dengan meningkatnya besaran DAU dan pengelolaan yang tepat sasaran, daerah dapat memperbaiki layanan publik dan kualitas hidup masyarakat yang akan tercermin dalam peningkatan nilai IPM.

2. Variabel DAK signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah perlu memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara efektif sesuai peruntukannya, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi indikator utama IPM.
- **Implikasi:** Pengelolaan DAK yang tepat akan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan antar kabupaten/kota, sehingga IPM secara agregat akan meningkat.

3. Variabel PAD signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui optimalisasi retribusi, pajak daerah, maupun pengelolaan aset daerah secara produktif.

- **Implikasi:** Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program prioritas pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah perlu mengevaluasi efektivitas pengeluaran di sektor pendidikan. Fokus tidak hanya pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas program dan output yang dihasilkan, seperti peningkatan akses pendidikan, mutu tenaga pendidik, dan sarana-prasarana.
- **Implikasi:** Pengeluaran pendidikan yang tidak efektif dapat berdampak buruk terhadap IPM. Dengan perbaikan tata kelola dan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, pengeluaran pendidikan diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM.

5. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah sebaiknya terus meningkatkan proporsi anggaran di sektor kesehatan serta memastikan alokasi anggaran digunakan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan kesehatan ibu-anak, gizi, dan pengendalian penyakit.
- **Implikasi:** Peningkatan pengeluaran kesehatan yang tepat sasaran akan berdampak langsung pada peningkatan usia harapan hidup, kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan IPM daerah.

6. Variabel Jumlah Penduduk signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

- **Saran:** Pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi jumlah penduduk sebagai modal pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan kerja, dan perluasan akses pendidikan.

Implikasi: Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas, daerah memiliki potensi tenaga kerja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan IPM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Ekobis*, 22(1), 1–11.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/view/13388/6982>
- Aryanti, E. N. (2023). Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(02), 223–234.
- Badan Pusat Statistik (2022) Diambil pada 5 Desember 2024.
<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/publication/2015/11/24/25966cc343193d0f0e257855/indeks-pembangunan-manusia-2014.html>
- Damayanti, A. P., & Suryaningrum, D. H. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *Jurnal Maneksi*, 12(3), 614–627. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1733>
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan UMP terhadap IPM di Indonesia Tahun 2014–2018. *Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 241–249.
- Jasasila, J. (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 40.
<https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.192>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. “Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.”
- Kusumaningrum, R. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2006-2016. *Journal*

of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN KEDU TAHUN 2012-2016.

Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM di indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 01(02), 116–126.

Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). INDONESIA TREASURY REVIEW PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Budi Mulyana. *Indonesian Treasury Review*, 7(03), 255–270.

Nurhabibah, A., Boedirochminarni, A., Primita Sari, N., Pembangunan, E., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh PAD dan Angkatan Kerja Terhadap IPM. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 6, Issue 1).

Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap Ipm Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>

Rahmadillah, R., & Nurfaisha, N. (2024). Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 93–107. <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>

Silalahi, S. K., Arief, M., & Indrafana, I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

- Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 24407–24419. <https://jptam.org>
- Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 40–52.
- Subagia, I. G. N. K. A., & Utama, M. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Ipm Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2013-2020. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1538. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i12.p10>
- Syahputra, A. E. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. UIN SMH BANTEN.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- UNDP. (1990). Human development report 1990. New York: Oxford University Press
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Utami, R. D., & Gunawan, D. S. (2023). ANALYSIS EFFECT OF PROFIT-SHARING FUNDS, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, SPENDING SOCIAL ASSISTANCE AND CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA.

- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan reviews. upp stim ykpn.
- Wijiani, T. R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*. 1–12.
- Williantara, Gede F. & Budiasih, I Gusti A. N. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pada indeks Pembangunan manusia. Volume 16 no.3. E-jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. *Dspace UII*, 1–19.
- Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69.

LAMPIRAN

Common Effect

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/25 Time: 23:04

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-59.02268	23.95800	-2.463589	0.0144
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.346054	0.349146	0.991144	0.3225
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	-1.270754	1.012751	-1.254754	0.2106
LOG(PAD)	7.333703	0.410252	17.87611	0.0000
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_B...	2.332032	0.875082	2.664928	0.0082
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_D...	-0.192988	0.338609	-0.569945	0.5692
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	-6.973274	0.693491	-10.05532	0.0000
R-squared	0.666520	Mean dependent var	72.35329	
Adjusted R-squared	0.659191	S.D. dependent var	4.519494	
S.E. of regression	2.638430	Akaike info criterion	4.802927	
Sum squared resid	1900.438	Schwarz criterion	4.893797	
Log likelihood	-665.4098	Hannan-Quinn criter.	4.839375	
F-statistic	90.93993	Durbin-Watson stat	0.127201	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/25 Time: 23:04

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-143.1474	12.46041	-11.48818	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.212721	0.080729	2.635007	0.0090
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.124759	0.243901	4.611539	0.0000
LOG(PAD)	2.612356	0.239250	10.91894	0.0000
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH B...	-0.367719	0.211640	-1.737478	0.0836
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH D...	0.117577	0.070388	1.670419	0.0961
LOG(JUMLAH PENDUDUK)	8.494009	1.125642	7.545922	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.989160	Mean dependent var	72.35329
Adjusted R-squared	0.987346	S.D. dependent var	4.519494
S.E. of regression	0.508407	Akaike info criterion	1.619462
Sum squared resid	61.77613	Schwarz criterion	2.151699
Log likelihood	-185.7246	Hannan-Quinn criter.	1.832943
F-statistic	545.2146	Durbin-Watson stat	1.243015
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 02/19/25 Time: 23:05

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-47.36754	8.522836	-5.557720	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.015511	0.078555	0.197456	0.8436
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.465166	0.240411	6.094411	0.0000
LOG(PAD)	4.094715	0.198189	20.66070	0.0000
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH_B...)	-0.451037	0.210839	-2.139248	0.0333
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH_D...)	0.159697	0.070231	2.273868	0.0238
LOG(JUMLAH PENDUDUK)	-1.592869	0.617787	-2.578348	0.0105
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.424354	0.9579
Idiosyncratic random			0.508407	0.0421
Weighted Statistics				
R-squared	0.714506	Mean dependent var	5.349808	
Adjusted R-squared	0.708232	S.D. dependent var	1.138673	
S.E. of regression	0.615061	Sum squared resid	103.2759	
F-statistic	113.8730	Durbin-Watson stat	0.808099	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.332688	Mean dependent var	72.35329	
Sum squared resid	3802.881	Durbin-Watson stat	0.021946	

Uji Chou

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	209.218534	(34,239)	0.0000
Cross-section Chi-square	959.370333	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Method: Panel Least Squares
Date: 02/19/25 Time: 23:05
Sample: 2016 2023
Periods included: 8
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-59.02268	23.95800	-2.463589	0.0144
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.346054	0.349146	0.991144	0.3225
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	-1.270754	1.012751	-1.254754	0.2106
LOG(PAD)	7.333703	0.410252	17.87611	0.0000
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_B...	2.332032	0.875082	2.664928	0.0082
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH D...	-0.192988	0.338609	-0.569945	0.5692
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	-6.973274	0.693491	-10.05532	0.0000
R-squared	0.666520	Mean dependent var		72.35329
Adjusted R-squared	0.659191	S.D. dependent var		4.519494
S.E. of regression	2.638430	Akaike info criterion		4.802927
Sum squared resid	1900.438	Schwarz criterion		4.893797
Log likelihood	-665.4098	Hannan-Quinn criter.		4.839375
F-statistic	90.93993	Durbin-Watson stat		0.127201
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	132.554741	6	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.212721	0.015511	0.000346	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.124759	1.465166	0.001690	0.0000
LOG(PAD)	2.612356	4.094715	0.017962	0.0000
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_B...	-0.367719	-0.451037	0.000338	0.0000
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_D...	0.117577	0.159697	0.000022	0.0000
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	8.494009	-1.592869	0.885410	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN_MANUSIA

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/25 Time: 23:06

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-143.1474	12.46041	-11.48818	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.212721	0.080729	2.635007	0.0090
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.124759	0.243901	4.611539	0.0000
LOG(PAD)	2.612356	0.239250	10.91894	0.0000
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_B...	-0.367719	0.211640	-1.737478	0.0836
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH_D...	0.117577	0.070388	1.670419	0.0961
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	8.494009	1.125642	7.545922	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989160	Mean dependent var	72.35329
Adjusted R-squared	0.987346	S.D. dependent var	4.519494
S.E. of regression	0.508407	Akaike info criterion	1.619462
Sum squared resid	61.77613	Schwarz criterion	2.151699
Log likelihood	-185.7246	Hannan-Quinn criter.	1.832943
F-statistic	545.2146	Durbin-Watson stat	1.243015
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	739.8404 (0.0000)	0.265992 (0.6060)	740.1064 (0.0000)
Honda	27.20001 (0.0000)	-0.515744 (0.6970)	18.86862 (0.0000)
King-Wu	27.20001 (0.0000)	-0.515744 (0.6970)	10.76930 (0.0000)
Standardized Honda	28.79213 (0.0000)	-0.130868 (0.5521)	16.54970 (0.0000)
Standardized King-Wu	28.79213 (0.0000)	-0.130868 (0.5521)	8.723917 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	739.8404 (0.0000)

Model Terbaik Fixed Effect

Dependent Variable: INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Method: Panel Least Squares

Date: 02/19/25 Time: 23:07

Sample: 2016 2023

Periods included: 8

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-143.1474	12.46041	-11.48818	0.0000
LOG(DANA_ALOKASI_KHUSUS)	0.212721	0.080729	2.635007	0.0090
LOG(DANA_ALOKASI_UMUM)	1.124759	0.243901	4.611539	0.0000
LOG(PAD)	2.612356	0.239250	10.91894	0.0000
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH B...	-0.367719	0.211640	-1.737478	0.0836
LOG(PENGELUARAN PEMERINTAH D...	0.117577	0.070388	1.670419	0.0961
LOG(JUMLAH PENDUDUK)	8.494009	1.125642	7.545922	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.989160	Mean dependent var	72.35329
Adjusted R-squared	0.987346	S.D. dependent var	4.519494
S.E. of regression	0.508407	Akaike info criterion	1.619462
Sum squared resid	61.77613	Schwarz criterion	2.151699
Log likelihood	-185.7246	Hannan-Quinn criter.	1.832943
F-statistic	545.2146	Durbin-Watson stat	1.243015
Prob(F-statistic)	0.000000		

Statistika Deskriptif

	INDEKS P...	DANA ALO...	DANA ALO...	PAD/1000000	PENGELU...	PENGELU...	JUMLAH P...
Mean	72.35329	312566.8	1080078.	387344.5	726966.9	404180.0	1023212.
Median	71.36500	340127.2	1087155.	313825.7	734048.5	384255.4	976727.5
Maximum	84.60000	1022710.	2599482.	2863408.	1375154.	1028212.	2043077.
Minimum	63.98000	52510.00	440041.2	146652.0	64331.39	379.3092	121112.0
Std. Dev.	4.519494	135912.6	323295.3	346530.0	242171.0	135676.9	444483.1
Skewness	0.843452	0.156146	0.861261	5.204156	-0.264225	1.098170	0.061699
Kurtosis	3.279257	4.292388	7.427979	33.13548	3.287381	5.988236	2.843081
Jarque-Bera	34.10904	20.62426	263.3642	11858.94	4.221552	160.4571	0.464922
Probability	0.000000	0.000033	0.000000	0.000000	0.121144	0.000000	0.792581
Sum	20258.92	87518711	3.02E+08	1.08E+08	2.04E+08	1.13E+08	2.86E+08
Sum Sq. Dev.	5698.805	5.15E+12	2.92E+13	3.35E+13	1.64E+13	5.14E+12	5.51E+13
Observations	280	280	280	280	280	280	280